

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi selama beberapa masa menurut Badan pusat statistik mula-mula relatif statis selama jangka panjang dan dalam waktu yang lama untuk mempertahankan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5% sampai 7% atau lebih setiap tahunnya. Menurut Arsyad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah” (1999) pembangunan tersebut ditinjau dari PDB, namun dalam dinamikanya pembangunan ekonomi tidak dapat hanya mengacu pada PDB saja, karena PDB tidak mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar dan mengakar, hal tersebut dapat kita lihat pada kualitas dan taraf hidup masyarakat yang tidak mengalami perbaikan dari waktu ke waktu meskipun PDB setiap tahunnya mengalami kenaikan sesuai target. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada tanda-tanda kesalahan yang cukup besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi.

Tidak jarang pula kita jumpai istilah pembangunan ekonomi dimaknai sebagai bentuk transformasi ekonomi, sosial juga budaya yang disengaja melalui strategi dan kebijakan yang mengarah pada hal yang diinginkan. Meningkatnya atau bertambahnya produksi yang pesat disektor industri dan juga sektor jasa merupakan tanda terjadinya suatu transformasi struktur ekonomi dan hal tersebut memperbesar pendapatan ekonomi. Bukan hanya transformasi struktural saja melainkan transformasi sosial dimana ada pendistribusian kemakmuran yang ditunjukkan dengan adanya pemerataan akses sumber daya sosial-ekonomi seperti kesehatan, fasilitas umum, air bersih, pendidikan, dan partisipasi politik. Namun, pada sektor pertanian akan sangat berbanding terbalik dengan sektro industri yang meningkat.

Menurut Budiharsono dalam penelitiannya yang berjudul “Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Antar Daerah di Indonesia 1969-1987” ada dua pendekatan dalam pembangunan daerah yaitu pendekatan sektoral dan juga pendekatan regional. Hal pertama kali perlu ditanyakan yaitu berkaitan dengan sektor yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah dibuat bersama. Kemudian diikuti dengan analisis perhitungan jumlah produksi dengan segala kelengkapannya seperti kapan waktunya dan bagaimana produksinya, menggunakan teknologi apa dan bagaimana caranya. Tidak lupa dengan pelengkap yang penting seperti lokasi produksi dan faktor-faktor pengaman yaitu kebijakan, strategi dan kerangka alur jalan yang dibuat. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih pada analisis atau pertanyaan mengenai daerah mana yang memerlukan prioritas untuk dikembangkan kemudian sektor apa yang sesuai dikembangkan dimasing-masing daerah sesuai dengan analisis yang telah dilakukan.

Di Indonesia ini kita memerlukan kedua pendekatan diatas untuk pembangunan yang sempurna. Hal ini sangat penting dari segi konsep juga segi pelaksanaan terutama yang menyangkut koordinasi pembangunan di daerah-daerah. Indonesia merupakan negara berkembang dimana fokus pembangunan nasionalnya adalah pembangunan ekonomi yang sangat berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang dapat diukur dengan besaran produk domestik bruto atau PDB dan produk domestik regional bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yang harus dilakukan pertama kali dalam perencanaan pembangunan daerah adalah meninjau keadaan daerah, masalah dan potensi pembangunan pada daerah yang akan dituju. Berdasarkan dengan sumberdaya yang kita miliki, maka seharusnya pengembangan potensi disuatu daerah harus dimaksimalkan. Berdasarkan undang-undang no 32 thn 2004 tentang pemerintah daerah, dimana dikatakan didalamnya bahwa pemerintah daerah

mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah untuk berbagai macam kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan mengenai perihal pembiayaan dan keuangan daerah sudah diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja. Namun juga diperlukan dukungan masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib dan harus tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk dapat di kelola secara optimal dan maksimal untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Pembangunan daerah yang kurang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang dimiliki, maka pemanfaatan sumberdaya alam maupun manusia tidak maksimal dan optimal. Jika hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan demikian pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat yang tumbuh serta berkembang.

Pada saat ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar dalam mengatur perekonomiannya sendiri atau sering disebut juga dengan otonomi daerah. Harapan pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing karena diyakini pemerintah daerah lebih mengetahui potensi dan kebutuhan daerahnya. Karena pertumbuhan ekonomi daerah merupakan representasi berhasil atau tidaknya suatu otonomi daerah, maka sangat dibutuhkan analisis untuk mengetahui kebutuhan dan potensi di daerah masing-masing untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari masa kemasa sehingga potensi juga dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pembangunannya tidak dapat terpisahkan dengan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat dari pembangunan daerah tersebut. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan salah satunya yaitu Kabupaten Bantul. Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang cukup strategis untuk menjalankan pembangunan ekonomi dengan baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain unggul di sektor pertanian, Kabupaten Bantul juga kaya akan sumber daya alamnya. Bantul mempunyai bahan tambang yang meliputi pasir, kerikil, tanah liat, batu gamping atau disebut juga dengan batu putih, kalsit, breksi, mangan bahan galian golongan B dengan cadangan yang sedikit dan tidak berpotensi untuk ditambang. Pertambangan di Kabupaten Bantul ini umumnya dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan izin SIPR, namun masih banyak juga penambang yang tidak mengantongi izin resmi.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul tahun 2010-2016 menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha [Seri 2010]	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1913122.77	1964025.87	1912487.87	1952982.72	1982709.13
B. Pertambangan dan Penggalian	97861.59	100263.06	101804.83	102422.60	102781.30
C. Industri Pengolahan	2011903.79	2138364.43	2224275.09	2283703.12	2404767.18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	20649.08	21910.89	23520.23	24243.81	27905.31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12151.73	12222.39	12649.03	13022.09	13407.66
F. Konstruksi	1305124.74	1368231.21	1447563.98	1506241.26	1567472.49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1095015.83	1156441.78	1232188.16	1315611.24	1401507.70
H. Transportasi dan Pergudangan	687776.64	721870.48	749086.09	777541.87	809961.04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1342268.43	1443507.63	1555098.45	1646727.01	1750671.45

J. Informasi dan Komunikasi	1277883.77	1358556.62	1454258.08	1536406.94	1664675.12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	314929.71	351945.03	385477.07	418450.28	439689.59
L. Real Estate	870666.45	910010.41	989905.28	1057941.53	1119537.25
M,N. Jasa Perusahaan	73135.32	76405.44	81440.78	87194.23	90911.30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	910575.32	959446.68	1010098.97	1063245.32	1125300.59
P. Jasa Pendidikan	948651.70	996811.54	1073653.81	1157438	1194995.37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244130.40	262486.88	281683.16	302837.02	318577.51
R,S,T,U. Jasa lainnya	281174.51	296218.95	315933.25	342511.40	363114.31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13407021.78	14138719.30	14851124.13	15588520.43	16377984.32

Sumber : [www.bpskabupatenbantul.go.id](http://www.bpskabupatenbantul.go.id)

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dari tahun ke tahun adalah sektor industri pengelolaan, sedangkan yang terkecil dari sektor informasi dan komunikasi. Terdapat perubahan pada besaran penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bantul, ditahun-tahun sebelumnya penyumbang terbesar adalah sektor pertanian hal ini dapat dilihat dari daerah Kabupaten Bantul adalah tergolong daerah agraris yang ditunjukkan oleh hamparan lahan pertanian yang sangat luas serta mata pencaharian masyarakat kebanyakan. Dengan demikian perlu diadakannya identifikasi dan analisis mengenai kondisi dan potensi sektor ekonomi menurut sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu pemerintah setempat dan juga tak lepas keikutsertaan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada dan harus mampu memperkirakan dan memprediksi potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang serta membangun perekonomian daerah dengan pengembangan sektor basis ekonomi, ekonomi sektor unggulan dan kesempatan kerja atau usaha yang beragam. Maka untuk tujuan tersebut diperlukan kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

Tabel 1.2

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul tahun 2010-2016 menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.38	15.34	14.46	14.60	14.39
B. Pertambangan dan Penggalian	0.71	0.66	0.66	0.65	0.61
C. Industri Pengolahan	15.12	15.44	15.50	15.06	15.17
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08
F. Konstruksi	9.51	9.37	9.35	9.33	9.29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.52	8.35	8.33	8.20	8.46
H. Transportasi dan Pergudangan	4.97	4.89	4.95	4.87	4.79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.32	10.97	11.38	11.59	11.67
J. Informasi dan Komunikasi	8.35	7.95	7.62	7.30	7.26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.48	2.58	2.73	2.82	2.82
L. Real Estate	6.35	6.25	6.46	6.53	6.58
M,N. Jasa Perusahaan	0.52	0.48	0.49	0.49	0.48
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.95	7.11	7.27	7.41	7.51
P. Jasa Pendidikan	6.79	6.65	6.83	7.10	6.92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.80	1.79	1.84	1.85
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.03	1.96	1.98	2.01	1.98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : [www.bpskabupatenbantul.go.id](http://www.bpskabupatenbantul.go.id)

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dari tahun ke tahun adalah sektor industri pengelolaan yaitu dengan rata-rata sekitar 15% setara dengan sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan, sedangkan yang terkecil dari sektor jasa perusahaan yang menduduki angka rata-rata sekitar 0,5%. Dan diikuti dengan sektor-sektor lainnya.

Tabel 1.3  
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul tahun 2010-2016 menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2016 (Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.73	2.66	-2.62	2.12	1.52
B. Pertambangan dan Penggalan	2.03	2.45	1.54	0.61	0.35
C. Industri Pengolahan	-2.34	6.29	4.02	2.67	5.30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.53	6.11	7.34	3.08	15.10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.52	0.58	3.49	2.95	2.96
F. Konstruksi	5.10	4.84	5.80	4.05	4.07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.92	5.61	6.55	6.77	6.53
H. Transportasi dan Pergudangan	4.58	4.96	3.77	3.80	4.17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.34	7.54	7.73	5.89	6.31
J. Informasi dan Komunikasi	10.19	6.31	7.04	5.65	8.35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.62	11.75	9.53	8.55	5.08
L. Real Estate	7.71	4.52	8.78	6.87	5.82
M,N. Jasa Perusahaan	6.23	4.47	6.59	7.06	4.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.28	5.37	5.28	5.26	5.84
P. Jasa Pendidikan	6.24	5.08	7.71	7.80	3.24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.62	7.52	7.31	7.51	5.20
R,S,T,U. Jasa lainnya	5.99	5.35	6.66	8.41	6.02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.33	5.46	5.04	4.97	5.06

Sumber : [www.bpskabupatenbantul.go.id](http://www.bpskabupatenbantul.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2011-2016 rata-rata laju pertumbuhan dari beberapa lapangan usaha ekonomi yang paling tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bantul yaitu sektor keuangan dan asuransi dengan rata-rata laju pertumbuhan sekitar 9% diikuti dengan sektor lainnya dan sektor pertambangan serta penggalan merupakan sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan terkecil yaitu sekitar 2%. Jadi jika dihitung secara

keseluruhan maka rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul adalah sebesar 5%.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Sektor apa yang menjadi basis di Kabupaten Bantul 2012-2016?
2. Sektor apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana kondisi perekonomian kabupaten selama bantul 2012-2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai penulis adalah, ebagai berikut :

1. Mengetahui sektor basis di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui potensi di Kabupaten Bantul.
3. Mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Memeberikan informasi tentang perkembangan sektor basis dan potensial, struktur ekonomi, dan kondisi perekonomian di Kabupaten Bantul.
2. Memberikan informasi kepada para peneliti yang lain baik dalam bidang yang sama ataupun tidak.
3. Sebgai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan referensi untuk lembaga pemerintah yang bersangkutan dalam rangka pembangunan daerah.
4. Sebagai acuan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada diKabupaten Bantul.

